

**PENERAPAN APLIKASI E-BUPOT INSTANSI PEMERINTAH
PADA PUSKESMAS KECAMATAN KEBON JERUK
JAKARTA BARAT**

Oleh
Lenny Andani

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Salah satu pajak yang terbesar yaitu pajak dari wajib pajak orang pribadi atau penghasilan pribadi. Salah satu pajak yang dipungut pemerintah yaitu pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dipungut atas upah, gaji, dan tunjangan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Tujuan laporan tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat menggunakan sistem baru yaitu aplikasi E-Bupot Unifikasi. Berdasarkan penulisan laporan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan atas Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan sesuai dengan ketentuan PMK 231/2019.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21, Electronic Bukti Potong.

**APPLICATION OF E-BUPOT APPLICATIONS GOVERNMENT
AGENCY
IN KEBON JURUK DISTRICT PUSKESMAS
WEST JAKARTA**

By
Lenny Andani

ABSTRACT

Tax is one of the largest sources of income in Indonesia. One of the scattered taxes is the tax from individual taxpayers or personal income. One of the incentives levied by the government is income tax article 21. Article 21 income tax is a tax levied on wages, salaries, and allowances obtained by domestic individual taxpayers. The purpose of this final report is to find out the mechanism for calculating, withholding, depositing and reporting Income Tax Article 21 for Civil Servants carried out by the Kebon Jeruk District Health Center, West Jakarta using a new system, namely the Unification E-Bupot application. Based on the writing of the report, it can be concluded that the application of calculating, withholding, depositing and reporting income taxes for Civil Servants is carried out in accordance with the provisions of PMK 231/2019.

Keywords: Income Tax, Income Tax Article 21, Electronic Proof of Withholding.